

**KEBIJAKAN PEMERINTAH BANYUMAS  
TENTANG RELOKASI PEDAGANG BURUNG  
TERHADAP MEKANISME PASAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.Sy)

**Oleh:**

**MIFTA KHULHUDA**

**NIM. 1123203027**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mifta Khulhuda  
NIM : 1123203027  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Purwokerto, 16 Juni 2015

Saya yang menyatakan

  
**Mifta Khulhuda**  
**NIM. 1123203027**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Juni 2015

**Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.**

Hal : Skripsi  
Sdra. Mifta Khulhuda  
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.  
Rektor Institut Agama Islam Negeri  
Purwokerto  
Di  
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan arahan, telaah, koreksi, dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah saudara :

Nama : Mifta Khulhuda  
NIM : 1123203027  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syari'ah  
Angkatan Tahun : 2011  
Judul Skripsi : **Kebijakan Pemerintah Banyumas Tentang Relokasi Pedagang Burung Terhadap Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam.**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



**Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag**  
NIP. 19630922 199002 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

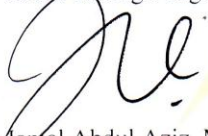
## PENGESAHAN

Skripsi berjudul


### **KEBIJAKAN PEMERINTAH BANYUMAS TENTANG RELOKASI PEDAGANG BURUNG TERHADAP MEKANISME PASAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Yang disusun oleh Saudara/i **MIFTA KHULHUDA** NIM. **1123203027** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.


Ketua Sidang/Penguji

  
Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Sofia Yustiani Suryandari, M.Si.  
NIP. 19780716 200901 2 006

Pembimbing/Penguji

  
Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.  
NIP. 19630922 199002 2 001

Purwokerto, 9 Juli 2015  
Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan.

  
Dr. Fathul Aminudin Aziz, M.M.  
NIP. 19630403 199403 1 004



## **MOTTO**

**”Memajukan perkonomian umat Islam dengan menumbuhkan mekanisme pasar yang selaras prinsip ekonomi Islam”**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga, bapak ibu dosen yang membimbing saya agar saya jadi lebih hebat dari bapak ibu dosen sekalian dan teman-teman semuanya terutama teman-teman sekelas ES yang telah bersama-sama melewati suka dan duka saat bersama di bangku kuliah ini.



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah SWT., Dzat Yang menguasai setiap jiwa, mencengkeram semua nyawa, hanya dengan izin-Nya terlaksana segala macam kebajikan dan teraih segala macam kesuksesan. Shalawat beriring rahmat serta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Muhammad saw, yang kepada beliau diturunkan wahyu ilahi Al-Qur'an, dan ditugaskan untuk menjadi suri tauladan bagi semua umat di dunia.

Atas berkat rahmat Allah dan motivasi dari keluarga, kerabat, sahabat dan teman, serta di dorong oleh cita-cita ingin cepat lulus, maka tersusunlah skripsi yang berjudul: "*Kebijakan Pemerintah Banyumas tentang Relokasi Pedagang Burung terhadap Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam*". Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah pada Program Studi Ekonomi Syari'ah.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang di hadapi, namun dengan segala daya dan upaya serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT, dan didukung oleh motivasi dari berbagai pihak, maka peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan penelitian yang terbaik. Akhir kata, penulis memohon ribuan maaf atas semua keterbatasan, dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik.

Purwokerto, 2015

Penulis

**Mifta Khulhuda**  
NIM. 1123203027

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional .....	5
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitain .....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : KEBIJAKAN FISKAL, MEKANISME PASAR DAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM</b>	
A. Kebijakan Fiskal.....	14
B. Mekanisme Pasar .....	17



C. Prinsip Ekonomi Islam.....	24
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Pasar Burung Peksi Bacingah.....	50
B. Dasar Kebijakan Pemerintah tentang Relokasi .....	55
C. Mekanisme Pasar di Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto	61
D. Mekanisme Pasar Burung Perspektif Ekonomi Islam.....	72
E. Kebijakan Pemerintah Banyumas Merelokasi Pedagang Burung Perspektif Ekonomi Islam .....	78
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
C. Kata Penutup .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Fisik Bangunan.....	54
Tabel 2: Data Pedagang .....	54
Tabel 3: Potensi pendapatan pasar .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kurva keseimbangan pasar .....	20
Gambar 2: Struktur Organisasi Pasar Burung.....	53



## ABSTRAK

Judul : Kebijakan Pemerintah Banyumas Tentang Relokasi Pedagang Burung Terhadap Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam.  
Penulis : Mifta Khulhuda  
NIM : 1123203027

Dalam melakukan kegiatan ekonomi pasti tidak akan pernah lepas dari prinsip ekonomi yaitu permintaan dan penawaran. Bertemunya permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen disebut harga keseimbangan atau mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini berlangsung pula di Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto. Namun dalam kenyataannya, mekanisme pasar yang diserahkan kepada permintaan konsumen dan penawaran produsen saja akan menimbulkan faktor-faktor kegagalan pasar. Untuk meminimalisir kegagalan pasar maka diperlukan peran pemerintah. Salah satu bentuk peran pemerintah adalah melakukan relokasi pasar. Namun pada kenyataannya, tidak jarang relokasi menimbulkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat permintaan konsumen di pasar tersebut. Bahkan, relokasi kadang mendapat penolakan dari pedagang karena dinilai tempat yang ditawarkan pemerintah tidak strategis dan akan merugikan para pedagang. Relokasi pun terjadi pada para pedagang burung di area Jalan D.I Panjaitan (sebelah selatan Pasar Wage Purwokerto) yang dipindah ke pasar burung baru yang telah disediakan pemerintah di Jalan Kongsen. Berbeda dengan relokasi pada biasanya yang berujung penolakan, pada relokasi pedagang burung ini disambut positif oleh para pedagang burung, karena pedagang menilai relokasi akan memberikan banyak keuntungan bagi pedagang. Karena hal tersebut, relokasi pasar burung ini menjadi topik yang menarik untuk dikaji oleh peneliti.

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dasar hukum kebijakan pemerintah, menganalisis pengaruh kebijakan Pemerintah Banyumas terhadap mekanisme pasar burung, dan menganalisis mekanisme pasar menurut pandangan Islam di Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dengan metode kualitatif. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data didapatkan, kemudian data analisis dengan metode deskriptif untuk menjawab setiap rumusan masalah dan menarik kesimpulannya.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Banyumas memiliki 4 dasar hukum untuk merelokasi pedagang. Pengaruh kebijakan pemerintah berdampak positif bagi 3 pihak (pemerintah sendiri, pedagang dan pembeli di pasar burung tersebut). 9 prinsip ekonomi Islam sudah cukup baik berjalan di pasar burung. Dan kebijakan pemerintah Banyumas merelokasi pedagang burung telah sesuai dengan 5 prinsip ekonomi Islam

Kata kunci : Kebijakan pemerintah, relokasi pedagang, mekanisme pasar, dan perspektif ekonomi Islam

## ABSTRAK

Judul : Kebijakan Pemerintah Banyumas Tentang Relokasi Pedagang Burung Terhadap Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam.  
Penulis : Mifta Khulhuda  
NIM : 1123203027

Dalam melakukan kegiatan ekonomi pasti tidak akan pernah lepas dari prinsip ekonomi yaitu permintaan dan penawaran. Bertemunya permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen disebut harga keseimbangan atau mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini berlangsung pula di Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto. Namun dalam kenyataannya, mekanisme pasar yang diserahkan kepada permintaan konsumen dan penawaran produsen saja akan menimbulkan faktor-faktor kegagalan pasar. Untuk meminimalisir kegagalan pasar maka diperlukan peran pemerintah. Salah satu bentuk peran pemerintah adalah melakukan relokasi pasar. Namun pada kenyataannya, tidak jarang relokasi menimbulkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat permintaan konsumen di pasar tersebut. Bahkan, relokasi kadang mendapat penolakan dari pedagang karena dinilai tempat yang ditawarkan pemerintah tidak strategis dan akan merugikan para pedagang. Relokasi pun terjadi pada para pedagang burung di area Jalan D.I Panjaitan (sebelah selatan Pasar Wage Purwokerto) yang dipindah ke pasar burung baru yang telah disediakan pemerintah di Jalan Kongsen. Berbeda dengan relokasi pada biasanya yang berujung penolakan, pada relokasi pedagang burung ini disambut positif oleh para pedagang burung, karena pedagang menilai relokasi akan memberikan banyak keuntungan bagi pedagang. Karena hal tersebut, relokasi pasar burung ini menjadi topik yang menarik untuk dikaji oleh peneliti.

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dasar hukum kebijakan pemerintah, menganalisis pengaruh kebijakan Pemerintah Banyumas terhadap mekanisme pasar burung, dan menganalisis mekanisme pasar menurut pandangan Islam di Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dengan metode kualitatif. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data didapatkan, kemudian data analisis dengan metode deskriptif untuk menjawab setiap rumusan masalah dan menarik kesimpulannya.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Banyumas memiliki 4 dasar hukum untuk merelokasi pedagang. Pengaruh kebijakan pemerintah berdampak positif bagi 3 pihak (pemerintah sendiri, pedagang dan pembeli di pasar burung tersebut). 9 prinsip ekonomi Islam sudah cukup baik berjalan di pasar burung. Dan kebijakan pemerintah Banyumas merelokasi pedagang burung telah sesuai dengan 5 prinsip ekonomi Islam

Kata kunci : Kebijakan pemerintah, relokasi pedagang, mekanisme pasar, dan perspektif ekonomi Islam

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau juga dapat dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.<sup>1</sup>

Menurut Sadono Sukirno, kebijakan fiskal yaitu kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi tanpa adanya inflasi.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Gilarso, kebijakan pemerintah dalam mengatur keuangan negara (pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan, khususnya pajak ) disebut kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan sarana pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi nasional, pembangunan, produksi, konsumsi, kesempatan kerja, perdagangan, dan harga.<sup>3</sup>

Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam lingkup ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai cara

---

<sup>1</sup>Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Bumi aksara, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika,1985), hlm. 264.

<sup>3</sup>T.gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* ( Yogyakarta: Kanisius, 2004 ), hlm. 141.

diantarnya adalah membangun jalan sebagai distribusi kebutuhan, membangun pasar sebagai tempat jual beli, memberikan pelatihan usaha pada masyarakat, menetapkan harga suatu barang agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pasar, dan lain-lain.

Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi sama saja dengan adanya supir yang menuntun akan ke mana arah ekonomi kita untuk maju, maka dari itu peran dari kebijakan pemerintah sangat diperlukan, walaupun pada kenyataannya kebijakan pemerintah kadang masih tidak sesuai yang diharapkan masyarakat atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan sebuah kebijakan tersebut. Akan tetapi, pemerintah memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Salah satu bentuk kebijakan fiskal adalah dibangunnya pasar. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat terjadinya pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli. Dalam analisis ekonomi, pengertian pasar tidak terbatas pada suatu tempat tertentu. Pasar untuk minyak tidaklah dimaksudkan sebagai tempat jual dan beli minyak, tetapi tempat interaksi antara produsen dan pembeli minyak di seluruh pelosok dunia. Sebaliknya pasar untuk beras mungkin hanya meliputi suatu wilayah yang lebih terbatas.<sup>4</sup> Pasar dijadikan pusat kegiatan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier.

Fungsi-fungsi negara menurut pembukaan UUD 1945 adalah “. . . . . melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahkan

---

<sup>4</sup>Ensiklopedi Nasional Indonesia. 2004. PT Delta Pamungkas, Bekasi.

Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dari teks di atas ada kalimat “memajukan kesejahteraan umum, yang artinya pemerintah harus berusaha menjaga persediaan kebutuhan masyarakat, menjaga kestabilan harga pokok, menjaga jumlah uang dalam peredaran dan kegiatan dalam perbankan, melakukan ekspor impor, mendorong usaha masyarakat agar lebih maju, dan lain-lain. Mendorong usaha masyarakat agar lebih maju pun dapat dilakukan dengan cara membangun pasar sebagai tempat masyarakat melakukan transaksi ekonomi.

Pemerintah atau sektor negara dapat dipandang sebagai suatu unit ekonomi atau rumah tangga yang menghasilkan barang dan jasa tertentu untuk kepentingan umum dengan menggunakan sumber daya atau faktor produksi yang langka dan dengan demikian ikut ambil bagian dalam arus barang/jasa dan arus uang dalam lingkaran kegiatan ekonomi nasional. Dalam hal ini dapat ditanyakan : apa output atau hasil produksi pemerintah, apa input sumber daya yang digunakan, dana apa atau berapa pengeluaran dan penerimaannya. Dengan demikian dapat dimengerti pokok persoalan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah dan bagaimana pemerintah harus mengatur keuangan negara demi kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam hal ini pemerintah kabupaten Banyumas pun melakukan kebijakan fiskal untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakatnya, di

---

<sup>5</sup> T.gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* ( Yogyakarta: Kanisius, 2004 ), hlm. 133.



antaranya dengan cara memperbaiki pasar agar sarana dan prasarananya lebih baik seperti memperbaiki Pasar Wage, Pasar Patikraja dan Pasar Sokaraja. Selain itu, pemerintah juga membangun beberapa pasar baru di antaranya adalah pembangunan pasar burung Peksi Bacingah Purwokerto.

Dibangunnya pasar burung bukan tanpa sebab, di antaranya semakin banyaknya pedagang burung yang berdagang di depan area pertokoan Jln. D. I. Panjaitan yang tidak tertata sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas, konflik antara pedagang burung dan pemilik ruko disekitar, dan area parkir sekitar yang tidak dipakai untuk semestinya. Hal itu merupakan masalah yang harus diselesaikan dengan campur tangan pemerintah daerah. Selain itu, permintaan konsumen akan aneka burung berkicau yang semakin tinggi merupakan salah satu bentuk potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya pedagang burung. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah yang ada dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara merelokasi para pedagang burung ke Pasar Burung Peksi Bacingah di Jln. Kongsan yang sengaja dibangun pemerintah.<sup>6</sup>

Pada umumnya, relokasi dianggap merugikan pedagang karena teknis merelokasi itu adalah memindahkan tempat berdagang ke tempat lain yang sudah disiapkan pemerintah dan tak jarang tempat yang disiapkan pemerintah itu dinilai kurang strategis oleh para pedagang yang direlokasi sehingga menurunkan minat beli konsumen. Kondisi demikian mengakibatkan konflik

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Yuswanto (petugas kantor pasar burung) pada Rabu, 24 September 2014, pukul 14.00 WIB

antara pedagang dan pemerintah dikarenakan pedagang enggan untuk direlokasi dan beranggapan pemerintah tidak pro rakyat. Namun tidaklah demikian dengan relokasi pedagang burung di Jln. Panjaitan yang menanggapi dengan positif.<sup>7</sup> Tanggapan positif ini tentu ada hal yang mendasarinya sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti dengan mendalam.

Di samping itu, adanya relokasi pedagang burung pasti berpengaruh juga pada permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual yang terkait dalam mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah kecenderungan pasar bebas untuk perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang yakni sampai jumlah permintaan dan penawaran menjadi sama. Apabila tidak ada kelebihan permintaan ataupun kelebihan penawaran, tidak ada tekanan terhadap harga untuk berubah. Penawaran dan permintaan tidak selalu berada dalam *ekuilibrium* dan beberapa pasar mungkin tidak akan mencapai *ekuilibrium* dengan cepat apabila kondisi tiba-tiba berubah, namun kecenderungannya tetap, biasanya pasar mengarahkan pada keseimbangan.<sup>8</sup> Sehingga perlu dikaji mengenai perubahan mekanisme pasar sebelum dan sesudah relokasi.

Agama Islam adalah agama yang menuntun pemeluknya agar selamat dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Karena menuntun umatnya untuk selamat di dunia dan akhirat, dalam agama Islam terdapat banyak prinsip-prinsip Islam sebagai pedoman kehidupan manusia dalam berbagai kegiatan, tak terkecuali dalam melakukan kegiatan ekonomi maupun dalam pemerintahan.

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Yuswanto (petugas kantor pasar burung) pada Rabu, 24 September 2014, pukul 14.00 WIB

<sup>8</sup>Robert S. Pindyck, *Mikro Ekonomi* (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm. 28

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mendiskripsikan kebijakan pemerintah Banyumas tentang relokasi pedagang burung terhadap mekanisme pasar perspektif ekonomi Islam.

## B. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran tentang beberapa konsep yang terdapat dalam rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, penulis perlu menjelaskan istilah yang dipergunakan dan batasan konsep dalam judul penelitian sebagai berikut :

### 1. Kebijakan Pemerintah Banyumas

Kebijakan pemerintah dalam lingkup ekonomi sering disebut kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan UU No. 25/ 1999 yang menyatakan pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak, dan pemerintah pusat harus mentrasfer sebagian dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan pemerintah daerah.<sup>10</sup> Salah satu langkah untuk mengaplikasikan UU tersebut maka pemerintah Banyumas

---

<sup>9</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika, 1985), hlm. 264

<sup>10</sup>Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan pembangunan daerah* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm.

pun harus memiliki sumber pungutan dalam bentuk retribusi pasar dengan cara membangun pasar baru.

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi penelitian pada Perda Banyumas saja yang berhubungan dengan pasar, yang berhubungan dengan pedagang dan yang berhubungan dengan retribusi pasar.

## 2. Relokasi pasar burung

Pengertian relokasi adalah memindahkan tempat, dalam hal ini maksudnya relokasi pasar burung adalah pemindahan area berdagang untuk para pedagang burung, yang semula berdagang di depan area pertokoan Jln. D. I. Panjaitan lalu dipindahkan ke eks SD 2 Purwokerto kelompok PKBM dinas yang berada di Jln. Kongsen.

## 3. Mekanisme pasar

Permintaan konsumen dan penawaran produsen terhadap suatu barang merupakan fungsi dari harga barang tersebut. Bila permintaan dan penawaran bertemu maka akan menghasilkan keseimbangan harga atau disebut keseimbangan pasar, yaitu harga dan kuantitas yang terjadi pada saat permintaan dan penawaran berada dalam keseimbangan. Pada saat itu jumlah barang yang ingin dibeli konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan produsen.<sup>11</sup> Pengertian keseimbangan pasar sering disebut juga dengan istilah mekanisme pasar.

---

<sup>11</sup>Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan AMP YKPN, 2008), hlm. 20

Pada umumnya mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian, tetapi dalam keadaan tertentu ia menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya.<sup>12</sup>

Batasan masalah dalam mekanisme pasar ini hanya membahas 6 unsur yang harus pemerintah pertimbangkan dalam mekanisme pasar untuk memecahkan masalah yaitu: Penawaran, permintaan, aksesibilitas, informasi untuk konsumen, peraturan, dan penjagaan.

#### 4. Perspektif ekonomi Islam

Perspektif ekonomi Islam adalah pandangan menurut ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Dalam ajaran Islam memiliki 3 garis besar yaitu aqidah, akhlak dan syariah, syari'ah terdiri atas bidang muamalah (sosial) dan bidang ibadah (ritual). Dan muamalah yang digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablum minannas*) dalam berbagai hal, tidak terkecuali dalam hal ekonomi .

Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut: Prinsip kesatuan (*tauhid*), prinsip kebolehan, prinsip keadilan (*al 'adl*), prinsip kehendak bebas (*al hurriyah al muqayyadah*), prinsip

---

<sup>12</sup>Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonom* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.43

pertanggungjawaban, prinsip kebenaran: kebijakan dan kejujuran, prinsip kerelaan (*ar ridha*), prinsip kemanfaatan, dan prinsip haramnya riba.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dikaji hanya dengan 5 prinsip ekonomi Islam yang paling berhubungan dan 9 prinsip ekonomi Islam untuk menganalisis mekanisme pasarnya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa pengaruh kebijakan pemerintah Banyumas merelokasi pedagang burung terhadap mekanisme pasar ?
2. Bagaimana mekanisme pasar yang terjadi di pasar burung menurut perspektif ekonomi Islam ?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah Banyumas merelokasi pedagang burung perspektif ekonomi Islam ?

**IAIN PURWOKERTO**

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah Banyumas merelokasi pedagang burung terhadap mekanisme pasar.

---

<sup>13</sup>Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 27

- b. Untuk mengetahui mekanisme pasar yang terjadi di pasar burung menurut perspektif ekonomi Islam.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah Banyumas merelokasi pedagang burung perspektif ekonomi Islam .

## 2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan informasi ilmiah tentang kebijakan pemerintah Banyumas tentang relokasi pedagang burung terhadap mekanisme pasar di pasar burung Peksi Bacingah Purwokerto.
- b. Dapat dijadikan acuan bagi para pembaca dan para penganalisis dalam kebijakan pemerintah tentang relokasi pedagang burung terhadap mekanisme pasar.

## E. Kajian Pustaka

Sebagai pemikiran dasar penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian awal terhadap pustaka yang ada. Namun belum ada skripsi/hasil penelitian yang membahas seperti apa yang akan diteliti oleh penulis sehingga dalam pembuatan skripsi ini yang akan dijadikan sebagai tinjauan pustaka, peneliti akan mengemukakan beberapa artikel maupun buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian penulis. Adapun karya ilmiah tersebut di antaranya sebagai berikut:

Karya yang ditulis oleh Ani Sri Rahayu yang sudah berjudul *Pengantar kebijakan fiskal*. Menerangkan secara mendetail pengertian dan

tujuan kebijakan fiskal serta wewenang pemerintah dalam mengambil kebijakan.<sup>14</sup> Pembahasan tentang kebijakan fiskal juga terdapat dalam buku Sadono Sukirno yang berjudul *Ekonomi Pembangunan* yang membahas tentang pengertian kebijakan fiskal<sup>15</sup> serta buku karya Mudrajad Kuncoro dengan judul *Otonomi dan pembangunan daerah* yang membahas tentang dasar hukum dari kebijakan pemerintah daerah dan otoritas daerah dalam mengeluarkan kebijakan fiskal.<sup>16</sup>

*Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* karya Gilarso menjelaskan tentang ruang lingkup kajian ilmu ekonomi makro, mekanisme harga dan kehidupan ekonomi serta kapasitas pemerintah dalam mengelola perekonomian.<sup>17</sup> Lalu ada pula buku *Pengantar Ilmu Ekonomi mikroekonomi dan makroekonomi* karya Prathama Rahardja & Mandala Manurung membahas tentang kebijakan fiskal, permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar.<sup>18</sup>

Karya Robert S Pindyck dengan judul *Mikro Ekonomi*<sup>19</sup>, karya Sadono Sukirno dengan judul *Pengantar Teori Mikroekonomi*,<sup>20</sup> karya Iskandar Putong dengan judul *Ekonomi Makro dan Mikro*<sup>21</sup>, karya Suryawati dengan judul *Teori Ekonomi Mikro*<sup>22</sup> membahas tentang pengertian permintaan dan penawaran, faktor pengaruh permintaan dan penawaran, mekanisme

---

<sup>14</sup>Ani Sri Rahayu, *Pengantar kebijakan fiskal*, ( Jakarta: Bumi aksara, 2010)

<sup>15</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika, 1985)

<sup>16</sup>Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan pembangunan daerah* (Jakarta: Erlangga, 2004 )

<sup>17</sup>Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2004)

<sup>18</sup>Prathama Rahardja & Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi mikroekonomi dan makroekonomi* ( Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia, 2008)

<sup>19</sup>Robert S. Pindyck, *Mikro Ekonomi* (Jakarta: PT Indeks, 2009)

<sup>20</sup>Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

<sup>21</sup>Iskandar Putong, *Ekonomi Makro dan Mikro* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

<sup>22</sup>Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan AMP YKPN, 2008)



pasar/keseimbangan pasar, dan kelemahan-kekuatan mekanisme pasar serta bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam pasar.

Buku *Hukum Ekonomi Syari'ah*<sup>23</sup> karya dari Prof. H. Zainuddin Ali, M. A., buku *Managemen Syari'ah*<sup>24</sup> karya Kuat Ismanto, S. H. I., M. Ag., buku *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*<sup>25</sup> karya Syed Nawab Heidar Naqvi serta buku *Norma dan Etika Ekonomi Islam*<sup>26</sup> karya Dr. Yusuf Qardhawi adalah buku-buku yang membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, dasar dari prinsip tersebut dalam Islam, dan pelaksanaan prinsip ekonomi Islam dalam pasar.

Telaah pustaka di atas hanya membahas tentang kebijakan pemerintah atau mekanisme pasar atau ekonomi Islam saja tanpa menyatukan 3 materi tersebut menjadi satu kesatuan pembahasan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan penelitian terhadap kebijakan pemerintah, mekanisme pasar dan pandangan ekonomi Islam yang dijadikan satu kesatuan pembahasan dengan objek penelitian yaitu Pasar Peksi Bacingah Purwokerto.

Berdasarkan hasil pembacaan penulis terhadap buku-buku di atas, penulis berkeyakinan bahwa tidak ada dari tulisan-tulisan tersebut yang membahas tentang penelitian yang akan peneliti lakukan.

---

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

<sup>24</sup>Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

<sup>25</sup>Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993)

<sup>26</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penyusunan dalam penelitian ini dibagi dalam lima (5) bab, setiap bab dirinci ke dalam sub bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, berisi : latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori tentang kebijakan fiskal, mekanisme pasar dan prinsip ekonomi Islam, berisi : pembahasan tentang kebijakan fiskal, mekanisme pasar, prinsip ekonomi Islam.

Bab III : Metode penelitian, berisi : Jenis Penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV : Analisis data dan hasil penelitian, berisi: Gambaran umum pasar burung Peksi Bacingah, dasar kebijakan pemerintah tentang relokasi, mekanisme pasar yang terjadi di Pasar Peksi Bacingah Purwokerto, mekanisme pasar burung perspektif ekonomi Islam, dan kebijakan pemerintah merelokasi pedagang perspektif ekonomi Islam.

Bab V : Penutup, berisi : kesimpulan, saran, dan kata penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh kebijakan Pemerintah Banyumas tentang relokasi pedagang burung terhadap mekanisme pasar adalah mekanisme pasar menjadi lebih baik karena faktor-faktor kegagalan pasar dapat diminimalisir. Sehingga relokasi berdampak positif bagi: pemerintah, pedagang dan pembeli.
2. Mekanisme pasar yang terjadi di pasar burung menurut pandangan ekonomi Islam adalah sudah cukup baik karena 9 prinsip ekonomi Islam sudah mampu dijalankan, namun masih ada yang hanya mampu menjalankan 8 prinsip dari 9 prinsip ekonomi Islam. Adapun 1 prinsip ekonomi Islam yang belum dijalankan adalah prinsip ketidakjujuran dalam menjelaskan kondisi burung.
3. Jika dikaji dari 5 prinsip ekonomi Islam yang erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah, maka kebijakan pemerintah Banyumas merelokasi pedagang burung telah sesuai dengan 5 prinsip ekonomi Islam tersebut.

#### **B. Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai kebijakan Pemerintah Banyumas tentang relokasi pedagang burung terhadap mekanisme pasar perspektif ekonomi Islam (studi kasus Pasar Burung Peksi Bacingah

Purwokerto), peneliti ingin mengemukakan beberapa hal sebagai saran dari peneliti sendiri maupun dari pedagang dan pembeli di pasar burung, antara lain:

1. Pemerintah hendaknya sesegera mungkin merenovasi dan memperluas sarana yang ada di Pasar Burung Peksi Bacingah. Jika sudah berjanjian akan merenovasi pada tahun 2015, jangan ditunda-tunda.
2. Adanya demam batu akik telah menurunkan omzet penjualan pedagang burung, karena itu para pedagang harus lebih kreatif mempromosikan burung baik melalui media massa, mengadakan pameran/lomba burung di berbagai tempat seperti di pasar-pasar umum, dll.
3. Para pedagang untuk lebih jujur dalam menawarkan burungnya, agar pembeli tidak kecewa, sehingga untuk jangka panjang pembeli yang tidak kecewa tersebut diharapkan akan menjadi pembeli setia. Karena kejujuran pedagang meningkatkan kepercayaan pembeli.
4. Bagi calon pembeli burung, sebelum membeli burung hendaknya mencari data terlebih dahulu mengenai kriteria burung yang sehat dan berkualitas melalui berbagai cara seperti: mencari data di internet, bertanya pada orang yang lebih tahu, dll. Sehingga nantinya setelah membeli tidak kecewa baik dari kualitas maupun dari harga yang disepakati. Karena umumnya penjual burung pun tak mau dirugikan dengan pengembalian atau penukaran burung tersebut.
5. Pemerintah nagari, kelembagaan nagari, dan masyarakat sebaiknya menciptakan kondisi yang dinamis dan saling bekerjasama untuk meningkatkan pendapatan asli nagara

### **C. Kata Penutup**

*Alhamdulillah*, dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk dukungan semangat, nasehat, doa, tenaga, saran dan kritiknya. Semoga skripsi sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun nusa, bangsa dan agama.



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

Danupranata, Gita. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas Ekonomi Kampus Terpadu, 2006.

*Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Bekasi: PT Delta Pamungkas, 2004.

Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.

Hasil wawancara dengan Bapak Yuswanto (petugas kantor pasar burung) pada Rabu, 24 September 2014, pukul 14.00 WIB

Ismanto, Kwat. *Manajemen Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Kuncoro, Mudrajad. *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan pembangunan daerah*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Moelong, Lexy I. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja, 2002

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Pindyck, Robert S. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Indeks, 2009.

Putong, Iskandar. *Ekonomi Makro dan Mikro*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Rahardja, Prathama & Manurung, Mandala. *Pengantar Ilmu Ekonomi mikroekonomi dan makroekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

Sekaran, Uma. *Metodologi Penelitian untuk bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.

- Soeratno & Arsyad, Lincolin. *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2003.
- Sri Rahayu, Ani. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi aksara, 2010.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Subiyanto, Ibnu. *Metode Penelitian Manajemen dan Akuntansi*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika, 1985.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Supriyanto, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Supriyanto. *Metodologi Riset dan Bisnis*. Jakarta: Permata Puri Media, 2009.
- Suryawati. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan AMP YKPN, 2008.
- Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



**IAIN PURWOKERTO**

Foto-foto



Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto tampak depan



Suasana di Pasar Burung



Kantor Pasar Burung



Salah satu ruko pedagang burung



Area Parkir



Area ruko burung





Salah satu los burung



Area los burung



c



**IAIN PURWOKERTO**